

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Aktor yang Terlibat Dalam Perumusan Kebijakan Semarang *Smart City*

Output kebijakan pada perumusan kebijakan Semarang *Smart City* adalah Peraturan Walikota. Dengan demikian, Pemerintah Kota Semarang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan siapa aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan dibagi menjadi tiga unsur, yaitu *state*, *private*, dan *society*.

Pada unsur *state*, Walikota Semarang telah mengeluarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 100/495 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Semarang *Smart City*. Aktor-aktor tersebut yaitu Walikota Semarang; Wakil Walikota Semarang; Sekretaris Daerah Kota Semarang; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang; Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang; Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Semarang; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang; Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang; Dinas Penataan Ruang Kota Semarang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Semarang; Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang; Dinas Perhubungan Kota Semarang; Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang; Dinas Sosial Kota Semarang; Dinas Pendidikan Kota Semarang; Dinas Kesehatan Kota Semarang; dan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Pada unsur *private*, Pemerintah Kota Semarang mempercayakan kepada empat aktor dalam membantu pemerintah merumuskan kebijakan Semarang *Smart City*. Ketiga aktor tersebut yaitu PT. Dian Nuswantoro Teknologi dan Informasi (Dinustek), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Ibu Retno Susanti selaku akademisi. Namun, Pemerintah Kota Semarang tidak melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan Semarang *Smart City* secara langsung.

5.1.2 Peran yang Dilakukan Oleh Aktor Kebijakan

Dalam menganalisis peran yang dilakukan oleh aktor kebijakan, Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Peran yang dilakukan oleh aktor kebijakan pada indikator perilaku yang muncul akibat adanya interaksi adalah adanya perintah dan koordinasi. Hal tersebut

dapat dibuktikan dengan adanya kewajiban melaksanakan kebijakan akibat adanya interaksi yang dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan OPD lainnya agar proses perumusan kebijakan Semarang *Smart City* dapat berlangsung dengan sinergis. Pada interaksi pemerintah dengan swasta dan masyarakat, perilaku yang muncul adalah kerjasama. Pemerintah melakukan kerjasama dengan swasta sebagai bentuk hubungan saling menguntungkan. Adanya kerjasama tersebut juga menimbulkan adanya keterkaitan antara aktor kebijakan dengan perilaku yang dijalankan. Selain melakukan kerjasama dengan swasta, bentuk peran yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah pemberian aplikasi kepada masyarakat karena masyarakat hanya berfungsi sebagai pengguna kebijakan. Akibatnya, masyarakat akan berperan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan Semarang *Smart City*. Bentuk kontrol sosial tersebut adalah masyarakat dapat memberikan kritik dan saran kepada pemerintah terhadap kebijakan tersebut.

Commented [T1]: there's no such thing as disamping, seharusnya di samping. But that sounds off, mending ganti ((Selain itu). How?

Commented [T2]: Berlangsung dengan sinergis

5.1.3 Tingkat Kekuatan dan Ketertarikan Aktor Kebijakan

Tingkat kekuatan dan ketertarikan aktor kebijakan terhadap suatu isu dapat dibagi ke dalam empat kuadran Keempat kuadran tersebut yaitu

- a. *crowd* (lemah dalam *power* serta *interest*).
- b. *context setters* (memiliki *power* akan tetapi hanya memiliki *direct interest* yang kecil).
- c. *subject* yaitu *stakeholder* yang memiliki *interest* tapi dengan *power* yang kecil

d. *player* yaitu *stakeholder* yang memiliki *power* dan *interest* secara signifikan.

Pada kuadran *crowd*, tidak ada aktor yang diklasifikasikan untuk masuk ke dalam kuadran ini, karena tidak ada aktor yang memiliki tingkat kekuatan dan ketertarikan yang rendah. Pada kuadran *context setter*, posisi ini ditempati oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perkotaan Kota Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Dinas-dinas lain seperti Dinas Perhubungan Kota Semarang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang juga diklasifikasikan ke dalam kuadran ini. Pada kuadran *subject*, hanya akademisi yang masuk ke dalam kuadran ini. Selanjutnya pada kuadran *player*, Sekretaris Daerah Kota Semarang dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang memiliki tingkat kekuatan dan ketertarikan yang tertinggi menempati kuadran ini. Sedangkan posisi Dinustek, PLN, dan Telkom Semarang berada di tengah-tengah kuadran *crowd* dan *subject* karena memiliki kekuatan yang rendah dan ketertarikan yang lebih kecil bila dibandingkan dengan akademisi.

5.1.4 Pemetaan Orientasi Nilai Aktor Kebijakan

Pemetaan orientasi nilai aktor kebijakan menggunakan model *Stakeholders Mapping Analysis*. Model ini menganalisis aktor-aktor kebijakan dan diklasifikasikan berdasarkan tiga fenomena, yaitu tingkat keahlian (kontribusi), kemauan untuk terlibat, dan derajat keperluan untuk terlibat sebagai bentuk nilai yang mereka miliki.

Dalam nilai kontribusi, Pemerintah Kota Semarang memiliki pengetahuan terhadap isu *Smart City* dan memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Berbeda dengan swasta dan masyarakat dimana mereka tidak memiliki pengetahuan terhadap isu *Smart City* dengan baik.

Dalam nilai kemauan untuk terlibat, Pemerintah Kota Semarang proaktif dalam mengawal isu *Smart City*. Pemerintah Kota Semarang juga aktif berdiskusi dalam menentukan dan memilih alternatif kebijakan. Nilai yang sama muncul pada aktor swasta. Swasta bersikap proaktif karena membutuhkan kerjasama dengan pemerintah agar perusahaan bisa berjalan. Di lain sisi, masyarakat menjadi pasif karena bersifat sebagai pengguna kebijakan.

Dalam nilai keperluan untuk terlibat, Pemerintah Kota Semarang sebagai aktor utama kebijakan memiliki tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berbeda dengan nilai tersebut, swasta dan masyarakat harus menunggu gerak dari pemerintah. Selain itu, bagi masyarakat awam, yang mereka butuhkan adalah program yang langsung berdampak luas tanpa butuh pemahaman lebih sehingga masyarakat merasa tidak perlu untuk terlibat dalam proses kebijakan

5.2 Saran

1. Perlunya melibatkan lebih aktor non pemerintah terutama masyarakat, karena penentuan kebijakan publik yang terlalu menekankan pemerintah birokrasi (bercirikan *top-down*) dirasa kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat luas. Untuk meningkatkan peran aktor-aktor lainnya terkait

dengan perumusan kebijakan Semarang *Smart City*, diperlukan strategi sinergitas antar aktor kebijakan yang tepat.

2. Perlunya inisiatif pemerintah daerah untuk mewujudkan *good societal governance*, karena seringkali peran serta masyarakat "diwakili" oleh lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Namun, para aktor tersebut dalam menjalankan perannya belum tentu betul-betul merepresentasikan kepentingan masyarakat yang sesungguhnya.
3. Masing-masing aktor harus mengetahui perannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran dan pelanggaran kewenangan.
4. Dalam rangka memaksimalkan sinergitas antar aktor kebijakan, maka rekomendasi yang diberikan oleh penulis adalah:
 - a. Adanya forum khusus yang terjadwal secara rutin agar perkembangan kebijakan dapat terpantau dengan baik.
 - b. Adanya pendekatan khusus baik formal maupun informal kepada masyarakat untuk mengedukasi keberadaan Semarang *Smart City*.

Commented [T3]: Adalah: